



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI**

# **LKPJ**

**Semester I (Pertama)**

**Tahun 2021**

# Daftar isi

Kata Pengantar .....	1
<b>BAB I. Pendahuluan .....</b>	<b>2</b>
1.1 Dasar Hukum .....	2
1.2 Visi dan Misi .....	4
1.3 Data Umum .....	4
1.Geografis.....	5
2.Jumlah Penduduk .....	5
3. Pertumbuhan Penduduk .....	6
4. Jumlah PNS .....	6
5. Realisasi Jenis Belanja .....	12
<b>BAB. II. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja</b>	
Daerah .....	17
<b>BAB. III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Menjadi</b>	
Kewenangan Daerah .....	23
<b>BAB. IV. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantu dan</b>	
Penugasan .....	30
4.1 Urusan Tugas Pembantuan .....	30
4.2. Hambatan dan Penyelesaian.....	30
<b>BAB. V. Penutup .....</b>	<b>31</b>

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah S.W.T Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kota Dumai dapat terselesaikan dengan baik. LKjIP berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebaga bentuk akuntabilitas public dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan ini juga sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. LKjIP ini menyajikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Untuk itud iharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian laporan ini kami buat, semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan kinerja serta membawa pemahaman dan pengetahuan bagi kita semua.

Dumai, Jui 2021

KEPALA  
DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI,



Mukhlis Suzabtri, S.Hut. T, MT  
**Pembina**

NIP. 19750313 199403 1 002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Dasar Hukum

Kota Dumai termasuk salah satu kota yang ada di Provinsi Riau dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru di Provinsi Riau sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada awal terbentuknya Kota Dumai meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur. Dalam perkembangannya, Kota Dumai berkembang menjadi 5 (lima) Kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai. Selanjutnya pada tahun 2009, Kota Dumai kembali mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan.

### 1.2. Visi Misi

Visi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 yaitu *"Terwujudnya masyarakat dumai yang makmur dan madani pada Tahun 2021"*

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) Masyarakat Dumai yang makmur: keadaan masyarakat kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan bathin.

Arti kata :

- a) Layak : wajar; pantas; patut ; mulia; terhormat
- b) Lahir :keduniaan; jasmani
- c) Bathin :sesuatu yang terdapat di dalam hati; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya)

- 2) Masyarakat Dumai yang madani : Keadaan masyarakat kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban

Arti kata:

- a) Nilai : sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya
  - b) Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu;
  - c) Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
  - d) Berperadaban: yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa;
- 3) Tahun 2021 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2016-2021 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi Pemerintah Kota Dumai periode Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan air minum yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan
4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
5. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan

6. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah.
7. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu.
8. Inspektorat Kota Dumai menyadari bahwa keberadaannya diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berharga bagi Pemerintah Kota Dumai khususnya dan masyarakat pada umumnya. Melalui pengawasan yang dilakukannya, Inspektorat Kota Dumai berusaha memotivasi auditan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Dumai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berusaha memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Dumai dan masyarakat.
9. Inspektorat Kota Dumai berperan menciptakan manajemen pemerintahan yang baik sehingga Pemerintah Kota Dumai dapat memberikan pelayanan prima yang maksimal kepada masyarakat umum secara efektif, efisien, serta responsif.
10. Dalam usaha mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, Inspektorat Kota Dumai sadar bahwa peran dan kewenangannya di bidang pengawasan memerlukan dukungan aparat yang handal, trampil, beriman dan taqwa. Untuk itu, dengan perkembangan otonomi daerah, aparat pengawasan dituntut agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Inspektorat Kota Dumai berusaha mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan cara melakukan pendidikan/pelatihan, seminar serta *workshop* di bidang pengawasan.

### 1.3. Data Umum Daerah

#### a. Data Geografis

Ditetapkannya Undang-Undang No, 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru di Provinsi Riau sebagai pengejawantahan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah adalah 8.198,26 km<sup>2</sup>, yaitu pengurangan dari 15.854,29 km<sup>2</sup> dengan 7.656,03 km<sup>2</sup>. Kota Dumai dengan 204.674 (dua ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh empat) hektar, wilayah perairan seluas 71.393 (tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar, terletak pada posisi antara 101° 0' 38" - 101° 43' 33" Bujur Timur, 01° 26' 50" - 02° 15' 40" Lintang Utaradan secara administratif berbatasan dengan : Sebelah Utara : Selat Rupat, Pulau Rupat Sebelah Timur : Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis Sebelah Selatan : Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kab. Bengkalis Sebelah Barat : Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko, Kab. Rokan Hilir.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumberdaya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dapat memberikan keuntungan ekonomis yakni biaya tenaga kerja yang relatif murah dan terjaminnya persediaan tenaga kerja. Sementara itu sebagai penerima manfaat pembangunan, berarti semua upaya yang Rencana Terpadu dan Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kota Dumai Tahun 2017 - 2021 Bab II - Profil Kota Dumai II - 6 dilakukan oleh pembangunan sasarannya adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban pembangunan jika tidak disertai oleh peningkatan derajat kualitas penduduk yang memadai. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk. Jumlah penduduk di Kota Dumai secara umum mengalami

pertambahan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya.

## Penduduk

Penduduk Kota Dumai Tahun 2010, berjumlah 253.803 jiwa yang terdiri atas 131.465 jiwa laki-laki dan 305.338 jiwa perempuan. Dengan Kepadatan Penduduk 178.00 jiwa/km<sup>2</sup> dengan laju pertumbuhan penduduk berkisar 3,51 persen/tahun.

No.	Tahun	Populasi
1	2000 <sup>[10]</sup>	173.188 jiwa
2	2008 <sup>[11]</sup>	236.778 jiwa
3	2010 <sup>[12]</sup>	253.803 jiwa
4	2012 <sup>[13]</sup>	277.995 jiwa
5	2020 <sup>[1]</sup>	316.782 jiwa

Menurut data tahun 2020, jumlah penduduk Kota Dumai yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Melayu, Batak, Minang sebagai warga mayoritas, lalu suku Jawa, Tionghoa, dan Bugis adalah sebanyak 286.000 jiwa dengan kepadatan rata-rata 156 jiwa/km<sup>2</sup> dan laju pertumbuhan sebesar 3,7% per tahun. Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk penduduknya.

### c. Jumlah PNS

#### **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **A. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Dumai**

Dinas Perikanan Kota Dumai berkedudukan di Jalan Dermaga No.08 - Kota Dumai. Dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai terdiri dari :



- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat meliputi :
  - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
  - 2. Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pembudidayaan Ikan, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan;
  - 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi Perikanan; dan
  - 3. Seksi Kesehatan
- d. Bidang Kenelayanan, terdiri dari:
  - 1. Seksi Kenelayanan ;
  - 2. Seksi Pengawasan Usaha Perikanan; dan
  - 3. Seksi Sarana dan Prasarana dan Pengelolaan Tempat Lelang Ikan;
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional :

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat pada *Lampiran*.

### **Uraian tugas**

Dinas Perikanan Kota Dumai dibentuk melalui Peraturan Walikota Dumai Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kota Dumai, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang kelautan dan perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Perikanan Kota Dumai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup fungsinya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup fungsinya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup fungsinya;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup fungsinya ;
- e. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Dumai Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kota Dumai

Peraturan Walikota Dumai Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai sebagai berikut:

### **1. Sekretariat**

Sekretariat sebagaimana adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Tugas : melaksanakan perencanaan umum, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan Dinas Perikanan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Perikanan;

- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Perikanan;
- d. penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sekretaris, membawahi :

1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
2. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program di lingkungan Dinas Perikanan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian arsip dan dokumentasi.

## **2. Bidang Pembudidayaan Ikan**

Bidang Pembudidayaan ikan mempunyai tugas merumuskan, pelayanan, pembinaan, melaksanakan kebijakan, standarisasi teknis dan pengendalian usaha dibidang Pembudidayaan Ikan.

Bidang Pembudidayaan Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembudidayaan
- b) ikan pelaksanaan standarisasi dibidang pembudidayaan ikan;
- c) pelaksanaan pengembangan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi budidaya perikanan;
- d) penyelenggaraan pelayanan, pembinaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi dibidang pembudidayaan ikan;
- e) pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan;
- f) pelaksanaan kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan;
- g) penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pengembangan Usaha Budidaya, Seksi Sarana Prasarana dan Produksi serta Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
- h) penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Pembudidayaan Ikan terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan;
- b. Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi Perikanan; dan
- c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

### **3. Bidang Kenelayanan**

Bidang Kenelayanan ikan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, fasilitas perumusandan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan.

Bidang Kenelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
- b) penyiapan koordinasi pemberdayaan nelayan kecil;
- c) pemfasilitasian perumusan kebijakan kenelayanan dan perizinan usaha perikanan;
- d) penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- e) penyiapan pengawasan dan pembinaan Izin Usaha dibidang pembudidaya ikan dan penertiban izin usaha non perizinan nelayan;
- f) penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Kenelayanan, terdiri dari:

- a. Seksi Kenelayanan;
- b. Seksi Pengawasan Usaha Perikanan; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

6. Realisasi belanja menurut jenis belanja

Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penyerapan			
		S	R	R Triwulan II	% R
1	2	3	4	4	5
	6.316.036.440				
<b><u>BIDANG TATA USAHA</u></b>	<b>5.019.161.205</b>				
-					
<b><u>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</u></b>	<b>5.019.161.205</b>				
<b><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>	<b>219.771.912</b>				
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Dinas	5.669.605	500.000	1.800.000	-	31,75
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.970.150	63.989.670	-	-	0,00
3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.212.000	2.454.000	3.050.000	1.354.000	23,09
4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.344.157	-	3.250.000	1.280.000	44,25
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.900.000	17.609.020	3.000.000	2.400.000	43,48

6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	135.676.000	17.870.000	47.827.600	41.374.900	35,25
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>914.165.796</b>				
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000		200.000	100.000	66,67
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	89.800.000		63.456.182	36.546.658	70,66
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	824.065.796	12.900.000	343.059.000	271.765.000	41,63
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>57.436.500</b>				
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.436.500		2.670.000	1.920.000	4,65
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.601.446.440</b>				
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.601.446.440		1.529.418.987	891.169.453	42,47
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada</b>	<b>83.363.347</b>				

	<b>Perangkat Daerah</b>					
12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	83.363.347		13.669.000	13.669.000	16,40
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>142.977.210</b>	<b>11.900.000</b>		-	<b>0,00</b>
	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.977.210	11.900.000	17.925.000	14.725.000	12,54
	<b>BIDANG KENELAYANAN</b>	<b>561.962.985</b>				
	<b>Program Pengelolaan Perikanan</b>	<b>62.100.000</b>	<b>8.450.000</b>	-	-	<b>0,00</b>
	<b>Tangkap</b>					
	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>62.100.000</b>				
14	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	62.100.000	8.450.000	-	-	0,00
15	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	0			-	
16	Penjaminan Ketersediaan Sarana Perikanan Tangkap	0			-	



	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil</b>	<b>499.862.985</b>				
	<b>Perikanan</b>					
	<b><i>Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan</i></b>	<b>499.862.985</b>				
	<b><i>Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</i></b>					
17	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah	499.862.985		1.645.000	1.645.000	0,33
	<b><u>BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN</u></b>	<b>734.912.250</b>				
	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>734.912.250</b>				
	<b><i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i></b>	<b>712.332.250</b>				
18	Pemberiaan Pendampingan. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	712.332.250		4.192.450	-	0,59
	<b><i>Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i></b>	<b>16.500.000</b>				
19	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penertiban Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam	16.500.000		-	-	0,00

	1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	<b><i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i></b>	<b>6.080.000</b>				
20	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0			-	#DIV/0!
21	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0			-	#DIV/0!
22	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	6.080.000			-	- 0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>6.316.036.440</b>			<b>2.035.163.219</b>	<b>24,10</b>

## BAB II PERUBAHAN DAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

<b>RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKPA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021	

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERIKANAN

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																					
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T - 1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				5,651,275,494	664,760,946	0	0	6,316,036,440	5,546,331,057	1,092,260,946	0	0	6,638,592,003	322.555.563		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,015,334,459	3,826,746	0	0	5,019,161,205	4,597,890,022	3,826,746	0	0	4,601,716,768	(417.444.437)		
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				57,436,500	0	0	0	57,436,500	56,995,000	0	0	0	56,995,000	(441.500)		
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		57,436,500	0	0	0	57,436,500	56,995,000	0	0	0	56,995,000	(441.500)			

3	25	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			3,601,446,440	0	0	0	3,601,446,440	3,264,002,003	0	0	0	3,264,002,003	(337.444.437)		
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, DumaiBarat, Purnama	3,601,446,440	0	0	0	3,601,446,440	3,264,002,003	0	0	0	3,264,002,003	(337.444.437)		
3	25	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			83,363,347	0	0	0	83,363,347	83,363,347	0	0	0	83,363,347	0		
3	25	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD(DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Dumai, DumaiBarat, Purnama	83,363,347	0	0	0	83,363,347	83,363,347	0	0	0	83,363,347	0		
3	25	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			219,771,912	0	0	0	219,771,912	200,211,912	0	0	0	200,211,912	(19.560.000)		
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PERIKANAN)			5,669,605	0	0	0	5,669,605	5,669,605	0	0	0	5,669,605	0		
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,970,150	0	0	0	50,970,150	50,970,150	0	0	0	50,970,150	0		

3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			13,212,000	0	0	0	13,212,000	8,992,000	0	0	0	8,992,000	(4.220.000)
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,344,157	0	0	0	7,344,157	7,344,157	0	0	0	7,344,157	0
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,900,000	0	0	0	6,900,000	6,900,000	0	0	0	6,900,000	0
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			135,676,000	0	0	0	135,676,000	120,336,000	0	0	0	120,336,000	(15.340.000)
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>910,339,050</b>	<b>3,826,746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>914,165,796</b>	<b>910,339,050</b>	<b>3,826,746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>914,165,796</b>	<b>0</b>
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			89,800,000	0	0	0	89,800,000	89,800,000	0	0	0	89,800,000	0

3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		820,239,050	3,826,746	0	0	824,065,796	820,239,050	3,826,746	0	0	824,065,796	0	
3	25	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>142,977,210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142,977,210</b>	<b>82,978,710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,978,710</b>	<b>(59.998.500)</b>		
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	142,977,210	0	0	0	142,977,210	82,978,710	0	0	0	82,978,710	(59.998.500)		
3	25	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		<b>62,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,100,000</b>	<b>84,600,000</b>	<b>427,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512,100,000</b>	<b>450.000.000</b>		
3	25	03	2.01		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>62,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,100,000</b>	<b>84,600,000</b>	<b>427,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512,100,000</b>	<b>450.000.000</b>		
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan(DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	62,100,000	0	0	0	62,100,000	62,100,000	0	0	0	62,100,000	0		
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (DINAS PERIKANAN)	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0	0	0	0	0	21,650,000	399,000,000	0	0	420,650,000	420.650.000		
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (DINAS PERIKANAN)	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0	0	0	0	0	850,000	28,500,000	0	0	29,350,000	29.350.000		

3	25	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>			<b>81,478,050</b>	<b>653,434,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734,912,250</b>	<b>371,478,050</b>	<b>653,434,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,024,912,250</b>	<b>290.000.000</b>
3	25	04	2.02		<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>			<b>60,928,050</b>	<b>651,404,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712,332,250</b>	<b>60,928,050</b>	<b>651,404,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712,332,250</b>	<b>0</b>
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		60,928,050	651,404,200	0	0	712,332,250	60,928,050	651,404,200	0	0	712,332,250	0
3	25	04	2.03		<b>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayakan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>16,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,500,000</b>	<b>16,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,500,000</b>	<b>0</b>
3	25	04	2.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan TandaDaftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK)dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PERIKANAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, DumaiBarat, Purnama	16,500,000	0	0	0	16,500,000	16,500,000	0	0	0	16,500,000	0
3	25	04	2.04		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>			<b>4,050,000</b>	<b>2,030,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,080,000</b>	<b>294,050,000</b>	<b>2,030,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296,080,000</b>	<b>290.000.000</b>
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PERIKANAN)	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	Kota Dumai, DumaiBarat, Purnama	0	0	0	0	109,200,000	0	0	0	0	109,200,000	109.200.000

3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PERIKANAN)	DAK Fisik- Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan					0	0	0	0	0	180,800,000	0	0	0	180,800,000	180.800.000
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					4,050,000	2,030,000	0	0	6,080,000	4,050,000	2,030,000	0	0	6,080,000	0
3	25	06			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>						<b>492,362,985</b>	<b>7,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499,862,985</b>	<b>492,362,985</b>	<b>7,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499,862,985</b>	<b>0</b>
3	25	06	2.01		<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>						<b>492,362,985</b>	<b>7,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499,862,985</b>	<b>492,362,985</b>	<b>7,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499,862,985</b>	<b>0</b>
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PERIKANAN)	Dana Insentif Daerah					492,362,985	7,500,000	0	0	499,862,985	492,362,985	7,500,000	0	0	499,862,985	0



### BAB III HASIL PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

#### 3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
						I		II		12		13=12/7x100%	
1	2	3	4	7		8		9		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		<b>Semua Bidang</b>											
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			5.019.161.205						2.029.325.769		40,43%
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%)	100	57.436.500	-		50		50	2.670.000	50,00%	4,65%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja, penganggaran dan laporan kinerja yang tersusun (Dokumen)	8	57.436.500	-	750.000	4	1.920.000	4	2.670.000	50,00%	4,65%

		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan laporan keuangan (7 Dokumen)	7	3.601.446.440	-		3		3	1.529.418.987	42,86%	42,47%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	12	3.601.446.440	-	638.249.534	6	891.169.453	6	1.529.418.987	50,00%	42,47%
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik* (%)	100	83.363.347	-		50		50	13.669.000	50,00%	16,40%
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* (dokumen)	1	83.363.347	-	-	-	13.669.000	-	13.669.000	0,00%	16,40%
			Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (Bulan)	12		-	6	6		50,00%			
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi umum perangkat daerah (100%)	100	219.771.912	-		50		50	58.927.600	50,00%	26,81%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik 3 unit kerja (Bulan)	12	5.669.605	-	1.800.000	6	-	6	1.800.000	50,00%	31,75%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	12	50.970.150	-	-	6		6		50,00%	0,00%
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor (Bulan)	12		-	6	6	50,00%				

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya logistik kantor pada 3 unit kerja (Bulan)	12		-		6		6		50,00%	
				12	13.212.000	-	1.696.000	6	1.354.000	6	3.050.000	50,00%	23,09%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan (Bulan)	12	7.344.157	-	1.970.000	6	1.280.000	6	3.250.000	50,00%	44,25%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan lainnya (Bulan)	12	6.900.000	-	600.000	6	2.400.000	6	3.000.000	50,00%	43,48%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas ke luar daerah dan kabupaten dalam riau (Bulan)	12	135.676.000	-	6.452.700	6	41.374.900	6	47.827.600	50,00%	35,25%
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (100%)	100	914.165.796	-		50		50	406.715.182	50,00%	44,49%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi kantor (surat)	1000	300.000	-	100.000	400	100.000	400	200.000	40,00%	66,67%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12	89.800.000	-	26.909.524	6	36.546.658	6	63.456.182	50,00%	70,66%

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan, jasa kantor, tenaga operator komputer, jasa pelayanan umum, tenaga keamanan dan supir (Bulan)	12	824.065.796	-	71.294.000	6	271.765.000	6	343.059.000	50,00%	41,63%	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	100	142.977.210	-		50		50	17.925.000	50,00%	12,54%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	14	142.977.210	3	3.200.000	2	14.725.000	5	17.925.000	35,71%	12,54%	
												<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	48,76%	40,43%
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>												
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>			62.100.000							-	0,00%	
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			62.100.000							-	0,00%	

		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Operasional pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil (Kelompok)	18	62.100.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
						<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>					0,00%	0,00%	
						<b>Predikat Kinerja</b>					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>			734.912.250						4.192.450		0,57%
		<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	Terlaksananya pembinaan kelompok pembudidaya ikan (kelompok)	60	712.332.250	-		25		25	4.192.450	41,67%	0,59%
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan sarana pendukung pendamping (Unit)	7	712.332.250	-	4.192.450	-		-	4.192.450	0,00%	0,59%
			Terlaksananya Operasional (Kali)	36		-		9		9		25,00%	
		<b>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya penertiban tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (laporan)	1	16.500.000	-		-		-	-	0,00%	0,00%

		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan kelompok pembudidayaan ikan (Bulan)	12	16.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>			6.080.000							-	0,00%	
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan hama dan penyakit ikan dalam 1 tahun (Kali)	30	6.080.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
												<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0,00%	0,57%
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>			499.862.985							1.645.000	0,33%	
		<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (dokumen)	7	499.862.985	-		3			3	1.645.000	42,86%	0,33%
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data pengolahan hasil perikanan (Data)	4	499.862.985	-		1	1.645.000		1	1.645.000	25,00%	0,33%
												<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	25,00%	0,33%
												<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Rendah

				6.316.036.440	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	40,73%	32,22%
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Rendah	Sangat Rendah

**BAB. IV**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS**  
**PEMBANTU DAN PENUGASAN**

**4.1.** Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun 2020 menerima Tugas Pembantuan dan Penugasan dari Pemerintah Pusat melalui kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan penugasan dari Pemerintahan/ Pusat ke daerah.

**4.2.** Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penegasan

Dalam hal pelaksanaan dilapangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Perikanan mengalami keterlambatan adalah hal pelaksanaannya karena kontraktor tidak tepat waktu dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga pekerjaan tidak selesai dengan yang diharapkan

Penyelesaian permasalahan diatas sudah juga dikonsultasikan ke Inspektorat Kota Dumai sebagai pembina OPD Kota Dumai dan merekomendasikan (Rekom) Pekerjaan hanya dibayarkan sesuai persentase pekerjaan yang telah diselesaikan untuk masa yang akan datang pekerjaan dapat sesuai dengan jadwal pekerjaan telah disepakati oleh konsultan dan kontraktor.



## BAB. V

### PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perikanan Kota Dumai Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Semester I ini disusun berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007, yang memuat pelaksanaan semua program dan kegiatan, keberhasilan, dan permasalahan yang dihadapi beserta solusinya, yang meliputi Beberapa program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Dumai .

Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, analisa dan evaluasi digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mendukung tercapainya *Kepemerintah yang Baik* pada masa mendatang.

Kami memiliki harapan besar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat menjadi media informasi kepada masyarakat, serta dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaanya.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita dalam Melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mendukung Walikota Dumai sudah baik ini menjadi lebih baik.